



Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi

**Analysis of Regional Financial Capability and Independence and its Relation to Economic Growth in Jambi City
*Competitiveness in South Sulawesi***

Deby Anggun Sari¹, Liona Efrina², Deki irawan³

^{1,2,3}Universitas Adiwangsa Jambi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah di Kota Jambi pada tahun 2003-2021, mengetahui kemandirian keuangan daerah di Kota Jambi pada tahun 2003-2021 dan mengetahui hubungan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi pada tahun 2003-2021. Metode penelitian yang digunakan untuk menentukan kemampuan keuangan daerah Kota Jambi tahun 2003-2021 dengan menghitung memakai rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah parameter pengukurannya adalah rasio kemandirian daerah dan mencari hubungan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi menggunakan analisis korelasi pearson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kota Jambi belum mampu dalam kemampuan keuangan daerahnya; (2) Tingkat kemandirian masih rendah sekali dan menunjukkan pola hubungan instruktif; (3) Hubungan Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi berkorelasi positif yang sangat kuat. Untuk Signifikansi hasil korelasi kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan signifikan.

Kata Kunci: Jambi City, Regional Financial Capability, Regional Financial Independence, Economic Growth

Abstract

This research aims to determine the regional financial capacity in Jambi City in 2003-2021, to find out the regional financial independence in Jambi City in 2003-2021 and to know the relationship between the ability and independence of regional finance with economic growth in Jambi City from 2003-2021. The research method used to determine the regional financial capacity of the City of Jambi in 2003-2021 by calculating using the ratio of fiscal decentralization, regional financial independence measurement parameters is the regional independence ratio and looking for the relationship of ability and regional financial independence with economic growth using Pearson correlation analysis. The results of this study indicate that: (1) Jambi City has not been able in the financial capacity of the region; (2) The level of independence is still very low and shows an instructive relationship pattern; (3) The Relationship between Regional Capability and Financial Independence with Economic

Analysis of Regional Financial Capability and Independence and its Relation to Economic Growth in Jambi City

Growth has a very strong positive correlation. For the significance of the results of the correlation of ability and financial independence of regions with economic growth has a significant relationship.

Keywords: *Jambi City, Regional Financial Capability, Regional Financial Independence, Economic Growth.*



PENDAHULUAN

Otonomi Daerah yang dicanangkan di Indonesia sejak tahun 2002 sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah otonom untuk membangun daerah dalam rangka akselerasi pembangunan, mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap tahunnya Kota Jambi menyusun dan melaksanakan anggaran dan belanja daerahnya yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD tentunya sudah dimuat tentang pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Salah satu anggaran pendapatan daerah yang diharapkan bisa dicapai dengan maksimal adalah anggaran pendapatan asli daerah. Hal ini merupakan tolak ukur bagi Kota Jambi dalam mengukur kemampuan melaksanakan otonomi daerah sebagaimana yang diungkapkan oleh Halim (2004) “untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah”.

Indikator lainnya keberhasilan suatu daerah otonomi dalam melaksanakan pemerintahannya adalah ketergantungan keuangan daerah dan desentralisasi fiskal. Menurut Halim (2002) “kemampuan keuangan daerah merupakan kekuatan dalam melaksanakan otonomi daerah, ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah yaitu:

1. Kemampuan keuangan daerah artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya,
2. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminal mungkin, agar PAD dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar”.

Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Selama kurun waktu tahun anggaran 2003-2021 pendapatan daerah Kota Jambi masih lebih besar dari dana pusat bila dibandingkan dengan PAD. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah, PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi Tahun 2003-2021

Tahun	Pendapatan Daerah (Jutaan Rupiah)	PAD (Jutaan Rupiah)	Dana Perimbangan (Jutaan Rupiah)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Jutaan Rupiah)
2003	284.531	23.436	218.565	28.106
2004	300.996	32.133	243.220	25.643
2005	334.669	35.947	279.976	18.746
2006	466.481	43.323	400.017	23.141
2007	522.838	45.525	455.407	21.906
2008	593.052	54.087	503.237	35.728
2009	608.555	55.671	501.409	51.475
2010	692.169	70.842	535.587	85.740
2011	869.966	98.999	603.816	167.151
2012	1.083.917	113.090	741.677	229.150
2013	1.164.353	149.042	821.634	193.677
2014	1.320.648	246.427	852.472	221.749
2015	1.387.222	263.925	858.678	264.619
2016	1.571.332	287.525	1.177.857	105.950
2017	1.500.600	397.295	1.013.006	90.299
2018	1.624.880	338.890	1.128.71	147.096
2019	1.699.540	393.430	1.121.47	160.080
2020	1.621.830	355.670	1.074.21	255.230
2021	1.652.950	384.730	1.070.42	255.230

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1 menjelaskan tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. disebabkan rendahnya PAD khususnya pajak daerah dan retribusi daerah. dan tingginya dana transfer yang diterima. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber-sumber PAD relatif rendah.

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan. realisasi anggaran. serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang



dikelola pemerintah. Bentuk penilaian kinerja tersebut berupa analisis rasio keuangan yang berasal dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Selanjutnya hasil rasio keuangan yang telah dianalisis tersebut digunakan sebagai media pengukuran dalam menilai kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerahnya. mengukur sejauh mana kemampuan aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Mengingat besarnya dukungan pendanaan dalam pengelolaan anggaran untuk menjalankan urusan/kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah. maka selaras dengan esensi otonomi daerah. besarnya sumber pendanaan untuk daerah tersebut harus dibarengi dengan diskresi yang luas untuk membelanjakannya sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik akan lebih efisien dan efektif. Dengan demikian keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (kepentingan publik). sehingga diharapkan local government spending tersebut akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus fiskal bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Namun harapan tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan. hal ini antara lain terlihat dari PDRB sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi regional. dimana setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal pertumbuhan. PDRB menunjukkan variasi antar daerah yang masih relatif tinggi. Hal tersebut memperlihatkan indikasi awal bahwa implementasi desentralisasi fiskal memberikan dampak yang bervariasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Tingkat pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2013-2017 (dalam persen)

Kabupaten/Kota	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kerinci	6.45	6.7	6.03	4.93	4.23	3.86	4.16
Merangin	5.48	6.21	5.55	4.93	4.25	0.83	5.09
Sarolangun	3.09	4.26	4.69	4.80	4.26	-0.25	6.61
Batang Hari	4.36	4.55	4.82	4.83	5.07	-0.39	4.74
Muaro Jambi	5.24	5.43	5.06	5.01	4.79	0.37	4.08
Tanjung Jabung Timur	1.87	2.7	3.13	2.94	4.21	-3.92	0.13
Tanjung Jabung Barat	3.98	3.14	4.25	6.77	5.01	-0.60	1.36
Tebo	5.28	5.38	5.6	4.98	4.76	-0.02	4.32
Bungo	5.13	5.2	5.67	4.65	4.19	-0.44	5.12

Analysis of Regional Financial Capability and Independence and its Relation to Economic Growth in Jambi City

Kota Jambi	5.56	6.81	4.68	5.30	4.73	-3.96	3.94
Kota Sungai Penuh	7.06	6.51	6.24	4.88	5.01	0.16	3.67
Rata-Rata	6.70	7.27	4.86	4.69	4.35	-0.44	3.66

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Dapat dilihat pada Tabel 2. pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang digambarkan dalam persen. Selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 pertumbuhan ekonomi cenderung berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di kabupaten/kota Provinsi Jambi dari tahun 2013-2017 terjadi pada Kabupaten Kerinci yaitu sebesar 6.88 persen setiap tahunnya. sementara pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3.62 persen setiap tahunnya. Hal yang menarik adalah Kota Jambi sebagai pusat wilayah yang ada di Provinsi Jambi rata-rata pertumbuhan ekonominya hanya berkisar pada angka 6.74 persen setiap tahunnya. angka ini kecil. lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci yang dilihat berdasarkan potensi produksi sektor PDRB-nya jauh lebih kecil dari Kota Jambi.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi kemungkinan dikarenakan pengaruh alokasi anggaran dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi diperlukan pembangunan sarana dan prasarana. untuk itu diperlukan campur tangan pemerintah disamping terbukanya peluang bagi pihak swasta. Dimana keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai. Tinggi rendah laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun berarti kesejahteraan ekonomi meningkat. sementara perekonomian yang menurun atau pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif berarti turunnya kesejahteraan ekonomi. Disisi lain tingkat pertumbuhan ekonomi juga digunakan untuk mengevaluasi tepat atau tidaknya kebijakan yang telah diambil sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian.

Pelaksanaan pembangunan juga menghadapi beberapa kendala diantaranya adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan adanya keterbatasan sumber dana pembangunan. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menyangkut kualitas yang masih rendah. kemajuan teknologi dan informasi lebih cepat daripada kemajuan sumber daya yang ada. akibatnya banyak daerah yang tidak menunjukkan perkembangan perekonomian yang berarti sementara itu keterbatasan dalam sumber dana pembangunan membuat ketimpangan antar masing-masing daerah kabupaten/kota. dimana terdapat daerah yang memiliki sumber dana pembangunan yang tinggi tetapi ada juga yang daerah memiliki sumber dana pembangunan yang rendah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1.) Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kemampuan keuangan daerah di Kota Jambi pada tahun 2003-2021; 2.) Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Jambi pada tahun 2003-2021; 3.) Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan tingkat kemampuan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi pada tahun 2003-2021.



METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber dengan mengambil data statistik yang sudah ada serta dokumen-dokumen lain yang terkait dan diperlukan.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data penjabaran realisasi pendapatan daerah yang diperoleh dari perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Jambi tahun 2003-2021;
2. Data gambaran umum daerah Kota Jambi di buku Kota Jambi dalam angka;
3. Data Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan tahun 2000 Kota Jambi tahun 2003-2021.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis informasi kuantitatif (data yang dapat diukur, diuji dan diinformasikan dalam bentuk persamaan, tabel dan sebagainya). Penelitian ini menggunakan metode analisis berdasarkan pengukuran rasio derajat desentralisasi fiskal dan pengukuran rasio kemandirian keuangan daerah.

Analisis Data

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Jambi maka digunakan indikator kemampuan keuangan daerah yang berupa Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). (Mahmudi, 2010)

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti Tabel 3. berikut ini:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0.00 – 10.00	Sangat Kurang

10.01 – 20.00	Kurang
20.01 – 30.00	Sedang
30.01 – 40.00	Cukup
40.01 – 50.00	Baik
> 50.00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM. 1991 dalam Bisma (2010)

Analisis kemandirian keuangan daerah

Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah digunakan alat analisis Rasio kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010)”. Formula untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah :

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat dan Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan empat macam pola hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2004) yaitu:

- Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangan dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4. berikut:

Tabel 4. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	> 25 - 50	Konsultatif
Sedang	> 50 - 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 - 100	Delegatif



Sumber: Halim. 2004

Analisis hubungan tingkat kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi

Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi digunakan analisis Korelasi Pearson. Korelasi

Rumusan korelasi pearson adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n \cdot \sum x \cdot y - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2] [n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Dimana :

- r = Nilai korelasi antara x dan y
- n = Banyaknya pasangan data x dan y
- $\sum x$ = Total dari jumlah variable x
- $\sum y$ = Total dari jumlah variable y

Koefisien Korelasi atau Pearson Correlations memiliki nilai paling kecil -1 dan paling besar 1.

1. Berkenaan dengan besaran angka ini, jika 0 maka artinya tidak ada korelasi sama sekali sementara jika korelasi 1 berarti ada korelasi sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa semakin nilai pearson correlations mendekati 1 atau -1 maka hubungan antara dua variabel adalah semakin kuat. Sebaliknya. Jika nilai r atau pearson correlations mendekati 0 berarti hubungan dua variabel menjadi semakin lemah.
2. Selain besarnya korelasi, tanda korelasi juga berpengaruh pada penafsiran hasil dalam analisis. Dimana tanda negatif (-) menunjukkan adanya arah yang berlawanan, sedangkan tanda positif (+) menunjukkan arah yang sama atau korelasi searah.

Adapun interpretasi tingkat keeratan hubungan antara variabel x dan y (variabel bebas dan terikat), digunakan tabel interpretasi koefisien korelasi dalam sugiyono (2000) sebagai berikut :

Tabel 5. Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199	Sangat Rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.00	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2000)

HASIL

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Untuk mengukur tingkat kemampuan Keuangan Daerah Kota Jambi menggunakan indikator kemampuan keuangan daerah yang berupa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Rasio ini menunjukkan perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin Tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 6. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kota Jambi
Tahun 2003-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Jutaan Rupiah)	Total Pendapatan Daerah (Jutaan Rupiah)	Rasio DDF (%)	Ket
2003	23.436	284.531	8.24	Sangat Kurang
2004	32.133	300.996	10.68	Kurang
2005	35.947	334.669	10.74	Kurang
2006	43.323	466.481	9.29	Sangat Kurang
2007	45.525	522.838	8.71	Sangat Kurang
2008	54.087	593.052	9.12	Sangat Kurang
2009	55.671	608.555	9.15	Sangat Kurang
2010	70.842	692.169	10.23	Kurang
2011	98.999	869.966	11.38	Kurang
2012	113.090	1.083.917	10.43	Kurang
2013	149.042	1.164.353	12.80	Kurang
2014	246.427	1.320.648	18.66	Kurang
2015	263.925	1.387.222	19.03	Kurang
2016	287.525	1.571.332	18.30	Kurang
2017	397.295	1.500.600	26.48	Sedang
2018	397.295	1.500.600	26.48	Sedang
2019	338.890	1.624.880	20,86	Sedang
2020	393.430	1.699.540	23,15	Sedang
2021	355.670	1.621.830	21,93	Sedang
Rata-rata	384.730	1.652.950	23,28	Sedang

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal = PAD/Total Pendapatan Daerah

Dari Tabel 6. perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Jambi selama periode 2003-2021. dapat dilihat bahwa tingkat desentralisasi Fiskal Kota Jambi termasuk dalam skala interval Kurang. karena masih berada dalam skala interval dengan antara 10.01-20.00 yaitu sebesar 12.88%. Hal tersebut dapat pula diartikan bahwa kemampuan kota Jambi untuk melaksanakan otonomi masih kurang.



Bila di lihat perkembangan setiap tahun sejak tahun 2003 hingga 2017. derajat desentralisasi fiskal Kota Jambi selalu berfluktuatif. kadang meningkat dan terkadang pula terjadi penurunan. Kondisi demikian disebabkan karena peningkatan penerimaan PAD yang lebih lamban dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Oleh karena itu Kota Jambi harus berusaha untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah yang sudah ada.

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah digunakan Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio kemandirian keuangan suatu daerah berguna untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakatnya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jambi tahun 2003-2021 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jambi Tahun 2003-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Jutaan Rupiah)	Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman (Jutaan Rupiah)	Rasio KKD (%)	Ket
2003	23.436	246.671	9.50	Rendah Sekali/Instruktif
2004	32.133	266.802	12.04	Rendah Sekali/Instruktif
2005	35.947	298.722	12.03	Rendah Sekali/Instruktif
2006	43.323	420.591	10.30	Rendah Sekali/Instruktif
2007	45.525	477.313	9.54	Rendah Sekali/Instruktif
2008	54.087	532.314	10.16	Rendah Sekali/Instruktif
2009	55.671	552.884	10.07	Rendah Sekali/Instruktif
2010	70.842	621.327	11.40	Rendah Sekali/Instruktif
2011	98.999	765.781	12.93	Rendah Sekali/Instruktif
2012	113.090	903.954	12.51	Rendah Sekali/Instruktif
2013	149.042	1.005.079	14.83	Rendah Sekali/Instruktif
2014	246.427	1.064.949	23.14	Rendah Sekali/Instruktif
2015	263.925	1.115.296	23.66	Rendah Sekali/Instruktif
2016	287.525	1.244.766	23.10	Rendah Sekali/Instruktif
2017	397.295	1.093.766	36.32	Rendah/Konsultatif
2018	397.295	1.128.710	35.20	Rendah/Konsultatif
2019	338.890	1.121.470	30.22	Rendah/Konsultatif
2020	393.430	1.074.210	36.63	Rendah/Konsultatif
2021	355.670	1.070.420	33.23	Rendah/Konsultatif
Rata-rata	179.082	789.738	7,64	Rendah Sekali/ Instruktif

Kemandirian Keuangan Daerah = PAD/Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman

Dari Tabel 7. perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2003- 2017. dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian keuangan Daerah Kota Jambi masih sangat rendah dalam kategori pola hubungan Instruktif. yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan Pemerintah Daerah. ini dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0%-25%. Rata-rata tingkat kemandirian keuangan Daerah Kota Jambi tahun 2003-2021 adalah 7.64%.

Rasio kemandirian yang masih sangat rendah dapat disebabkan pada sumber penerimaan daerah. tampaknya Pendapatan Asli Daerah masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk otonomi daerah. karena relatif rendahnya basis pajak / retribusi yang ada di daerah dan kurangnya pendapatan asli daerah yang dapat digali oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Untuk mengatasi hal tersebut. pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya. dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD.

Hubungan Tingkat Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah dengan pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi

Guna mengetahui hubungan antara tingkat kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada periode tahun 2003-2021 digunakan Uji Kolerasi Pearson. Hasil estimasi dari SPSS.25 untuk uji korelasi Pearson sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Analisa Korelasi Pearson SPSS.25

		Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi
Kemampuan Keuangan Daerah	Pearson Correlation	1	.978**	.885**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	15	15	15
	Pearson Correlation	.978**	1	.845**



Kemandirian Keuangan Daerah	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	15	15	15
Pertumbuhan Ekonomi	Pearson Correlation	.885**	.845**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	15	15	15

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan Tabel 8. hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji korelasi pearson. antara variabel kemampuan keuangan daerah dengan variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut mempunyai korelasi positif. atau semakin tinggi kemampuan keuangan daerah maka akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Besaran nilai korelasi yang didapatkan sebesar 0.978. Ini berarti kemampuan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang sangat kuat / sangat erat pada tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil daripada 0.05.

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi desentralisasi fiskal adalah kemampuan keuangan daerah. yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan. mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Semakin mandiri suatu daerah akan semakin leluasa dalam melakukan pembangunan maupun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya pada Tabel 8. juga dapat dijelaskan bahwa hubungan antara variabel kemandirian keuangan daerah dengan variabel pertumbuhan ekonomi melalui uji korelasi pearson didapatkan hubungan yang berkorelasi positif atau searah antara kedua variabel tersebut. Dimana nilai korelasi diantara kedua variabel tersebut sebesar 0.845 yang berarti kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang sangat kuat / sangat erat pada tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil daripada 0.05. Dengan kata lain. jika kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan. maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Putra (2016) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini sesuai dengan teori umum yang dikemukakan Tiebout dalam Suci (2014) untuk melihat hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi bahwa pada sistem desentralisasi fiskal dimana pemerintah daerah memainkan peran yang lebih penting daripada pemerintah pusat dalam penyediaan pelayanan publik akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyebab mendasar dari peningkatan kemampuan tersebut adalah karena pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui kebutuhan dan karakter masyarakat lokal. sehingga program-program dari kebijakan

pemerintah akan lebih efektif untuk dijalankan. sekaligus dari sisi penganggaran publik akan muncul konsep efisiensi karena tepat guna dan berdaya guna.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya. maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah selama periode penelitian relatif masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari Rasio deajarat desentralisasi fiskal.
2. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah selama periode penelitian relatif masih rendah. yang dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah.
3. Hubungan variabel kemampuan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi. menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah mempunyai korelasi positif dan berkorelasi sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi. Rasio kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi. menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah mempunyai korelasi positif berkorelasi sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk signifikansi hasil korelasi rasio kemampuan dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan.

SARAN

Dalam pelaksanaan otonomi daerah. kemampuan dan kemandirian keuangan daerah diperlukan agar tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat dikurangi melalui kebijakan-kebijakan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Jambi (2003 - 2017). Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2003 - 2017.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (2003 - 2017). Jambi Dalam Angka Tahun 2003 - 2017.
- Bisma, I Dewa Gde., Hery Susanto. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3
- Dethan. Stevany Hanalya. 2017. *Hubungan Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Ganec Sawara. Vol. 11 No. 1 Maret 2017
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit: UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit: UPP AMP YKPN. Yogyakarta



- Halim. Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Penerbit: UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Halim. Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (edisi ketiga)*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta
- Halim. Abdul.. M. Kusufi Syam. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim. Abdul.. Theresia Damayanti. (2007). *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi kedua*. Penerbit: UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Hamzah. Ardi. 2008. *Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pengangguran. Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis jalur (Studi Pada 29 Kabupaten 27 DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol. 17. No. 1. Juni 2015 Dan 9 Kota Di Propinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2006)*. Jurnal Studi Ekonomi. Vol III No. 1. Juni.
- Hessel. Nogi S. Tangkilisan. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo
- Irma. Sintia. 2017. *Kemandirian Keuangan daerah berimplikasi dengan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli Daerah (Survei pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014)*.
- Kamaroellah. R. Agoes. 2017. *Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Nuansa. Vol. 14 No. 1 Januari – Juni 2017.
- Kuncoro. Haryo. 2007. *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Penerbit: UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit: Andi. Yogyakarta
- Murni. Asfia. 2015. *Ekonomi Makro (Edisi Revisi)*. Penerbit: PT. Refika Aditama. Bandung.
- Nuridin.. Hassan Basri. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kota Jambi*. Jurnal Development.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putra. Rico.. Surya Hidayat. 2016. *Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3 No. 4. April – Juni 2016.
- Putra. Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Penerbit: Grafindo. Depok
- Setijaningsih. 2011. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2003-2010". Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Analysis of Regional Financial Capability and Independence and its Relation to Economic Growth in Jambi City

- Suci. Stannia Cahaya. 2014. *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. Fakultas Ekonomi Dan Manajemen IPB. Bogor.
- Sugiyono. 2000. *Statistika untuk Penelitian*. Penerbit: Alfabeta. Bandung
- Sumarsono. H., S. H. Utomo. 2009. *Deliberate Inflation pada Kebijakan Desentralisasi Fiskal Jawa Timur dan Dampaknya bagi Pertumbuhan Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. 1(3): 157-168.
- Sutriani. Amelia. 2016. *Analisis Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun*.
- Todaro. Michael. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Penerbit: Erlangga. Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wijaya. Dito., Haryadi, Zulgani. 2015. *Analisis Tingkat Ketergantungan Fiskal dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. Vol. 3 No. 1. Juli-September 2015. Universitas Jambi.
- Wurangian. Sanny., Daisy S.M. Engka., krest D. Tolosang. 2017. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Tomohon (Studi Kasus Di Kota Tomohon Periode Tahun 2007-2015)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 17 No. 01 Tahun 2017
- Yani. ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Penerbit: Grafindo. Jakarta
- Yuwono. Sonny dkk. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Penerbit: Bayumedia Publishing. Malang.